

# **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN RUKO PASAR BINTAN CENTER KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh:**

**Kharisma Putri Balqis  
NIM. 2105010050**

## **ABSTRAK**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Bintang Center Kota Tanjungpinang menjadi fenomena yang kompleks. Di satu sisi, aktivitas PKL mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan ketertiban, kemacetan, dan penggunaan ruang publik secara tidak teratur. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sebagai pihak yang berwenang memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan menertibkan keberadaan PKL agar tidak mengganggu kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah kota Tanjungpinang dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kawasan ruko pasar bintang center kota Tanjungpinang, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam (Harisa, 2023). Hasil penelitian menjelaskan Peran Pemerintah sebagai regulator, pemerintah mempunyai aturan terkait ketertiban umum yang didalamnya memuat tentang pelarangan penggunaan fasilitas umum sebagai sarana untuk berjualan. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu, pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi serta pendekatan persuasif terhadap PKL. Peran pemerintah sebagai fasilitator, dilakukan dengan penyediaan lokasi relokasi di Pasar Pujasera. Kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam melakukan penertiban antara lain; tidak adanya program pembinaan yang terstruktur bagi PKL, minimnya promosi terhadap lokasi relokasi, serta rendahnya kesadaran PKL terhadap pentingnya tertib aturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk pembinaan jangka panjang dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan penataan PKL yang lebih efektif dan berdaya guna.

**Kata Kunci: Peran, Penertiban, Pedagang Kaki Lima**

**THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF TANJUNGPINANG CITY  
IN REGULATION OF STREET VENDORS IN THE BINTAN CENTER  
MARKET RUKO AREA, TANJUNGPINANG CITY**

**By:**  
**Kharisma Putri Balqis**  
**2105010050**

**ABSTRACT**

*The existence of Street Vendors (PKL) in the Bintan Center Market area of Tanjungpinang City is a complex phenomenon. On the one hand, street vendor activities are able to drive the community's economy, but on the other hand, they cause problems of order, congestion, and irregular use of public space. The Tanjungpinang City Regional Government as the authorized party has an important responsibility in regulating and controlling the existence of street vendors so as not to interfere with public interests. This study aims to determine the role of the Tanjungpinang city regional government in controlling street vendors in the Bintan Center Market shophouse area of Tanjungpinang City, and the obstacles faced by the local government in controlling them. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type, using the theory of the Role of Government according to Ryaas Rasyid in (Listia Ningsih Harisa, 2023). The results of the study explain the Role of the Government as a regulator, the government has regulations related to public order which include the prohibition of the use of public facilities as a means of selling. The role of the government as a dynamicator, namely, the government carries out cross-agency coordination and a persuasive approach to street vendors. The role of the government as a facilitator is carried out by providing a relocation location at the Pujasera Market. The obstacles experienced by the local government in carrying out the control include; the absence of a structured coaching program for street vendors, minimal promotion of the relocation location, and low awareness of street vendors regarding the importance of orderly regulations. This study concludes that the role of the local government still needs to be strengthened through a more targeted and sustainable approach, including long-term coaching and increased cross-sector coordination to create a more effective and efficient arrangement of street vendors.*

**Key Words: Role, Regulation, Street Vendors**